

BAB II

KRONOLOGI PENYERANGAN DAN SPEKULASI YANG BERKEMBANG ATAS MOTIVASI AMERIKA SERIKAT

II.1. Kronologi Penyerangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan

Beberapa saat setelah terjadinya peristiwa 11 September, Amerika Serikat di bawah administrasi Bush mengumumkan bahwa yang bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah organisasi teroris Al-Qaeda yang dipimpin Osama bin Laden. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menyimpulkan bahwa organisasi tersebut berikut pemimpinnya berada di Afghanistan, yang kemudian menjadi justifikasi serangan Amerika Serikat hanya berselang satu bulan kemudian. Alibi Amerika dalam hal ini adalah pemerintah Afghanistan (rezim Taliban) menolak untuk bekerjasama dan menyerahkan bin Laden, dan karenanya dianggap bersekutu dengan teroris. Kebijakan Gedung Putih ini tercermin dalam pernyataan Bush yang terkenal, *either you are with us, or against us*.

Semenjak awal ide serangan itu telah menciptakan kontroversinya sendiri, yang sedikit banyak disebabkan oleh pernyataan-pernyataan Presiden Bush yang seringkali dinilai tidak “strategis”. Bush misalnya mengatakan bahwa perang yang dilancarkannya dimaksudkan untuk tujuan membersihkan dunia dari kejahatan, dengan nama operasi yang bahkan terdengar tendensius, yaitu *Operation Infinite Justice* (Operasi Keadilan Tanpa Batas).²⁶ Nama ini dipercaya telah diubah karena dipercaya dapat menyinggung umat Islam yang percaya bahwa Islam mengajarkan hanya Allah yang berhak menegakkan keadilan absolut..²⁷ Guna mencegah respons yang tidak diinginkan khususnya yang berasal dari masyarakat Muslim dunia, maka nama operasi ini kemudian diganti menjadi *Operation Enduring Freedom*. Lebih lanjut, menteri luar negeri negara sekutu Amerika Serikat, Inggris, yaitu Jack Straw

²⁶ Iwan Hadibroto, et al, *Perang Afghanistan: Di Balik Perseteruan AS vs Taliban*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm.2.

²⁷ *Ibid*, hlm.4.

bahkan sempat menegaskan kepada rakyat Afghanistan bahwa “Ini bukan perang melawan Islam. Ini perang melawan teroris.”²⁸

Serangan Amerika yang dimulai pada tanggal 7 Oktober 2001 berlangsung selama beberapa bulan, dengan serangan awal dilakukan operasi yang dilancarkan dari udara oleh pesawat-pesawat pembom yang berbasis di darat seperti B-1, B-2 dan B-52, pesawat-pesawat tempur berbasis kapal induk seperti F-14 dan F/A 18, dan rudal jelajah Tomahawk yang diluncurkan dari kapal dan kapal selam Amerika dan Inggris.”²⁹ Dengan dibantu oleh oposisi Taliban, yakni Aliansi Utara. Gabungan kekuatan tersebut menghasilkan kemenangan di pihak mereka yang ditandai dengan tergulingnya rezim Taliban. Tindakan Amerika Serikat ini dinilai banyak pihak melanggar hukum internasional dan semakin mengukuhkan citra Amerika Serikat sebagai entitas *superpower* yang unilateral. Citra ini semakin diperburuk dengan banyaknya korban sipil yang jatuh akibat salah sasaran, yang menurut laporan Taliban mencapai ribuan orang, belum termasuk jumlah penduduk yang harus mengungsi ke berbagai negara sekitar, yang diperkirakan mencapai lebih dari tiga juta orang.³⁰

Tindakan Amerika Serikat ini sesungguhnya bertentangan dengan resolusi PBB 1368, yang menyatakan bahwa “PBB meminta semua negara bekerjasama sungguh-sungguh untuk mengadili pelaku kejahatan)”, namun di sisi lain ada yang mengatakan bahwa tindakan AS untuk bersikap unilateral itu terjustifikasi dalam Statuta Mahkamah Internasional pasal 34 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “Hanya AS yang boleh terlibat untuk menyelesaikan masalah dunia di luar peradilan –seperti terhadap Afghanistan.” Dalam hal ini, AS tidak mempedulikan PBB, meskipun Piagam PBB pasal 1 dan 2 sangat menekankan prinsip perdamaian dan non-intervensi dalam hubungan internasional.³¹

Pasca penaklukan, Amerika kemudian berusaha mengatur negara itu dan mempromosikan beberapa nilai khususnya, seperti demokrasi dan liberalisme. Hingga

²⁸ *Op.cit.* Hlm. 27.

²⁹ http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=afghanwar_tmln&afghanwar_tmln_us_invasion_occupation, diakses pada 12 Februari 2009 pukul 23.11.

³⁰ <http://usa.mediamonitors.net/content/view/full/54715>, diakses pada 12 Februari 2009 pukul 10.32.

³¹ Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika*, (Jakarta: PT Pustaka Cidesindo, 2003), hlm. 152.

saat ini perlawanan masih terjadi secara sporadis terhadap pasukan pendudukan, walau secara umum tidak memperlihatkan adanya perubahan yang signifikan.

Pada saat yang bersamaan, dijalankannya Perang Melawan Teror dengan kekuatan miter telah semakin mengalienasi rakyat Afghan dan mengungkap sisi lain dari invasi Amerika Serikat: sebuah kampanye yang dipandang sebagai upaya menjamin keamanan dan hegemoni geo-strategis globalnya.

Sementara sebagian orang berpendapat bahwa efek jangka panjang yang diharapkan dapat muncul dengan cara menghilangkan kondisi-kondisi yang dapat menciptakan ekstremisme, Amerika Serikat justru memilih menjalankan operasi-operasi militer daripada pemberantasan kemiskinan dan pembangunan; sebuah fakta yang juga dinyatakan oleh laporan Dewan Senlis:³²

“Sementara masyarakat internasional telah membiayai operasi militer koalisi internasional di Afghanistan dengan biaya sembilan kali lipat daripada yang dikeluarkan untuk memerangi kemiskinan, sebanyak separuh dari negara itu, khususnya di wilayah selatan, dilanda pemberontakan dan krisis kelaparan yang semakin parah. Masyarakat internasional telah gagal memenuhi janjinya untuk membantu rekonstruksi Afghanistan. Rakyat Afghan dapat dengan jelas melihat semakin melebarnya jurang dalam pengeluaran internasional untuk tujuan militer dengan yang dikeluarkan untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Prioritas yang dijalankan dalam pengeluaran dana memperlihatkan bahwa masyarakat internasional telah menetapkan prioritas-prioritasnya sendiri terhadap Afghanistan dengan didasarkan pada sasaran-sasaran yang didefinisikan secara sempit, yakni ‘keamanan negara’/homeland security. Sebagai akibatnya, perasaan benci dan dikhianati semakin meningkat di kalangan rakyat Afghan. “

Lebih lanjut, perlakuan terhadap para tahanan oleh tentara Amerika Serikat telah lebih jauh membuat marah rakyat Afghan. Banyak kisah mengenai penyiksaan yang dilakukan oleh militer AS yang telah menyebar ke seluruh Afghanistan dan telah turut berkontribusi menguatkan persepsi masyarakat setempat bahwa AS memang tidak lebih dari sebuah kekuatan jahat.³³

³²http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=afghanwar_tmln&afghanwar_tmln_us_invasion_occupation, diakses pada 23 Januari 2009 pukul 18.00.

³³ *Ibid*

Operasi-operasi militer yang dijalankan juga turut menyebabkan munculnya pengungsian di wilayah Selatan dan Barat Daya Afghanistan. Kenyataan ini menyebabkan para penduduk harus bertahan hidup di kamp pengungsian yang tidak layak, yang menyebabkan ratusan anak-anak dan orang tua meninggal dunia setiap harinya. Operasi militer yang terus berjalan semakin memperparah situasi ini. Begitu sebuah keluarga mengalami terror oleh militer dan mengalami berbagai kerugian, mereka meninggalkan desa mereka hanya untuk menghadapi terror lain dalam bentuk kemiskinan akut, keputusasaan dan penyakit. Ketidakberdayaan dan terror kemiskinan dan penyakit ini diperlihatkan dengan pernyataan seorang warga desa Kandahar berikut:

"Mungkin demokrasi penting dalam budaya Anda, tapi dalam budaya kami memberi makan anak-anak kami lebih penting." ³⁴

Hingga kini perang Amerika Serikat melawan teroris belum berakhir, dan sebagaimana disebutkan dalam Buku Putih Kebijakan Pertahanan AS terhadap Afghanistan dan Taliban 2009, dinyatakan bahwa :

“Amerika Serikat memiliki kepentingan keamanan nasional yang vital terkait dengan potensi ancaman keamanan saat ini yang ditimbulkan oleh kaum ekstrimis di Afghanistan dan Pakistan. Di Pakistan, Al-Qaeda dan kelompok kaum teroris jihadis tengah mempersiapkan rencana serangan teror baru. Target mereka tetap tidak berubah, yakni Amerika Serikat, Pakistan, Afghanistan, India, Eropa, Australia, serta sekutu-sekutu AS di Timur Tengah, serta target lain yang dipandang menguntungkan. Semakin meluasnya area operasi para teroris ini merupakan hasil langsung dari kegiatan teroris Taliban dan organisasi-organisasi terkait. Pada saat yang bersamaan, kelompok ini tengah mencoba untuk menegakkan kembali basis mereka di Afghanistan. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan inti AS adalah menghancurkan, melucuti dan mengalahkan Al-Qaeda dan seluruh sel perlingkungannya di Pakistan, serta mencegah mereka dapat kembali lagi ke Pakistan maupun Afghanistan.”³⁵

³⁴ http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=afghanwar_tmln&afghanwar_tmln_us_invasion_occupation, diakses pada 23 Januari 2009 pukul 19.00.

³⁵ <http://www.uspolicy.be/Article.asp?ID=9C5DFE3E-8212-4FF5-A5BB-E3671E3B8ED3>, diakses pada 28 Maret 2009 pukul 23.00.

II.2. Spekulasi-spekulasi Seputar Motivasi Amerika Serikat dalam Penyerangan ke Afghanistan

Serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan merupakan fenomena internasional yang menarik perhatian banyak kalangan, setidaknya karena beberapa alasan. Pertama, ini merupakan suatu aksi militer internasional dalam skala yang cukup besar. Kedua, karena aksi ini melibatkan salah satu negara adidaya dunia saat ini, dan ketiga, Amerika Serikat melancarkan invasi tersebut dengan mengabaikan peran PBB secara eksplisit. Terakhir, invasi ini cenderung menerabas batas-batas sensitif perang *inter-state*, karena “kebetulan” terjadi antara dua entitas dengan latar kultural yang lebih luas (Barat dan Islam), khususnya bagi sebagian umat Islam yang kerap kali menganggap serangan ini merupakan serangan terhadap identitas mereka secara kolektif/keseluruhan.

Dalam hal ini, dunia internasional tanpa kecuali memiliki berbagai pandangan yang bersifat spekulatif dengan argumennya masing-masing sebagai upaya menjelaskan motivasi riil negara adidaya tersebut melakukan serangan. Adalah menarik bahwa terlepas dari pernyataan resmi pemerintah Amerika Serikat bahwa serangan itu tidak lain adalah sebuah upaya untuk memerangi teroris yang mengancam keamanan Amerika Serikat dan dunia, spekulasi-spekulasi yang berkembang sebagian besar justru mengarah kepada kesimpulan yang sama sekali berbeda. Dalam perkembangannya, terdapat dua pandangan *mainstream* untuk menjelaskan motivasi Amerika Serikat di balik fenomena ini, yakni pandangan bahwa serangan tersebut dilatari oleh motif ekonomi-politik semata, serta pandangan bahwa serangan tersebut didorong oleh alasan identitas semata.

II.2.1. Basis Keraguan atas Alasan Resmi AS

Alasan-alasan keraguan banyak pihak atas alasan resmi AS tersebut adalah penting untuk dibahas, setidaknya karena dua alasan. Pertama, jika memang motif “melawan terorisme” adalah motif yang telah disetujui oleh semua pihak secara agregat tanpa penolakan berarti, maka seharusnya pembahasan berhenti pada titik ini. Namun kenyataan menunjukkan bahwa banyak sekali pandangan yang berupaya mengungkap

dan mengurai motif “sebenarnya” di balik serangan tersebut. Ini berarti ketidakpercayaan tersebut eksis baik di ranah akademik maupun publik, dan karenanya penting untuk diamati lebih lanjut, karena pandangan dari masyarakat (termasuk akademik dan publik) pada gilirannya memiliki peran yang signifikan dalam suatu dinamika internasional.

Kedua, karena dampak politik yang ditimbulkan perang ini, yang melibatkan dua entitas dengan identitas yang dapat diperluas, yakni Amerika yang dianggap sebagai representasi Barat serta Afghanistan yang dipandang sebagai representasi Islam. Dengan demikian perang ini memiliki dampak psikologis yang khas bagi khususnya masyarakat Muslim yang merasa dijadikan sebagai korban. Interpretasi ekstrim yang hanya memandang dari satu perspektif (dalam hal ini merujuk pada mereka yang berpendapat ini perang Barat melawan Islam) beresiko hanya semakin memperkeruh hubungan kedua identitas (Islam dan Barat) yang pada gilirannya hanya akan merugikan kedua belah pihak. Karenanya, pembahasan yang didasarkan pada dua alasan ini diperlukan.

Terdapat beberapa laporan yang membahas mengenai “kejanggalan” serangan AS tersebut, dan menghubungkannya dengan serangkaian peristiwa yang dianggap merupakan dasar dari penyerangan yang sesungguhnya.

Sebuah website yang bernama World Socialist Web Site menjabarkan hal sebagai berikut:³⁶

Sebuah laporan telah tersebar di media-media di Inggris, Prancis dan India mengungkapkan bahwa pejabat-pejabat tinggi AS telah merencanakan perang terhadap Amerika Serikat pada musim panas 2001.³⁷ Laporan tersebut termasuk prediksi yang dibuat pada bulan Juli yang berisi keterangan “Jika aksi militer memang akan dilaksanakan, maka hal itu akan terjadi sebelum salju mulai turun di Afghanistan, paling lambat pada pertengahan Oktober.” Fakta menunjukkan pemerintahan Bush memulai penyerangan udara ke negara itu pada 7 Oktober 2001, yang dilanjutkan dengan serangan darat oleh pasukan elit AS pada 19 Oktober.

Bukanlah sebuah kebetulan jika informasi-informasi tersebut justru tersebar di berbagai negara lain dan justru bukan di AS sendiri. Kelas penguasa di negara-negara tersebut memiliki kepentingan ekonomi dan politiknya sendiri yang tidak berjalan

³⁶ <http://www.wsws.org/articles/2008/dec2008/afgh-d22.shtml>, diakses pada 17 Februari 2009 pukul 16.20.

³⁷ *Ibid*

seiring, dan beberapa bahkan saling bertolak belakang, dengan kepentingan elit Amerika Serikat untuk mengendalikan wilayah kaya minyak di Asia Tengah.

Media Amerika Serikat telah melakukan sebuah penutupan sistematis dari kepentingan ekonomi dan strategis riil yang mendasari perang terhadap Afghanistan, guna mempertahankan persepsi bahwa perang tersebut adalah reaksi spontan atas serangan teroris pada 11 September 2001.³⁸ **(EXPLAIN)**

Jaringan televisi dan media cetak Amerika Serikat merayakan kekalahan militer rezim Taliban yang begitu cepat sebagai sebuah keberuntungan yang tidak disangka-sangka. Mereka mengalihkan perhatian masyarakat dari sebuah kesimpulan yang akan dihasilkan oleh setiap pengamat manapun mengenai peristiwa yang berlangsung selama dua minggu itu: bahwa kemenangan kilat pasukan yang dipimpin oleh AS tersebut sesungguhnya memperlihatkan perencanaan dan persiapan matang dari militer AS, yang sudah pasti telah dimulai sebelum serangan terhadap WTC dan Pentagon terjadi.³⁹

Mitos resmi yang tersebar luas di Amerika adalah “segalanya berubah” pada hari ketika empat pesawat AS dibajak dan hampir 5000 orang terbunuh. Intervensi militer AS di Afghanistan kemudian tercipta dalam waktu kurang dari satu bulan. Wakil Sekretaris Pertahanan Paul Wolfowitz dalam sebuah wawancara televisi pada 18 November menyatakan bahwa hanya diperlukan waktu selama 3 minggu untuk menyiapkan perencanaan perang terhadap Afghanistan tersebut.

Informasi resmi yang dikeluarkan oleh Pentagon dan Gedung Putih mengenai perang terhadap Afghanistan tersebut dianggap masih dapat dipertanyakan. Sumber yang lain bahkan menuliskan secara lebih ekstrim, bahwa: “Apa yang terjadi sesungguhnya adalah intervensi AS telah direncanakan secara detil dan matang jauh sebelum serangan teroris memberikan alasan final untuk menjalankan rencana tersebut. Jika peristiwa 11

³⁸ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 22 Maret 2009 pukul 14.00.

³⁹ *Log.cit.*

September tidak pernah terjadi, adalah sangat mungkin Amerika Serikat akan tetap menyerang Afghanistan, dalam kurun waktu yang tidak terlalu berbeda.”⁴⁰

Sepanjang tahun 1999, tekanan AS terhadap Afghanistan meningkat. Pada tanggal 3 Februari tahun yang sama, Asisten Sekretaris Negara Karl E. Inderfurth dan kepala anti-teroris Departemen Dalam Negeri Michael Sheehan mengunjungi Islamabad, Pakistan, untuk menemui wakil menteri luar negeri Taliban, Abdul Jalil. Mereka memperingatkannya bahwa AS akan menganggap pemerintah Taliban adalah pihak yang bertanggung jawab atas serangan teroris apapun yang dilaksanakan oleh Bin Laden.

Dalam sebuah laporan di *Washington Post* (October 3, 2001), pemerintahan Clinton dan Nawaz Sharif, yang kemudian menjadi perdana menteri Pakistan, telah bersepakat melakukan operasi militer tertutup untuk membunuh Osama bin Laden pada 1999. AS direncanakan akan membantu menyuplai satelit intelijen, bantuan udara dan pendanaan, sementara Pakistan membantu dengan unit-unit militer yang memahami bahasa Pashtun yang akan menyusup ke selatan Afghanistan dan menjalankan pembunuhan tersebut.

Tim komando Pakistan telah bersiap-siap untuk melaksanakan serangan tersebut pada bulan Oktober 1999, dan salah satu pejabat Gedung Putih bahkan mengatakan pada harian tersebut, ”Ini sebuah kerjasama besar, sebuah proses yang sedang berjalan.” Pemerintahan Clinton dikatakan amat bersemangat dengan prospek keberhasilan rencana tersebut,.

Namun serangan tersebut dibatalkan pada tanggal 12 Oktober 1999, ketika Sharif digulingkan dalam sebuah kudeta militer oleh Jendral Pervez Musharraf, yang menghentikan rencana serangan tertutup tersebut. Pemerintahan Clinton kini harus mengandalkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang meminta Taliban untuk menyerahkan Bin Laden kepada “pihak yang berwenang”, namun tidak meminta sama sekali untuk menyerahkannya kepada Amerika Serikat.

⁴⁰ *Log.cit.*

Rencana AS untuk menggulingkan Taliban terus berlanjut pada tahun 2000, menurut sebuah laporan yang diterbitkan pada tanggal 2 November di *Wall Street Journal*, yang ditulis oleh Robert McFarlane, mantan penasihat keamanan nasional pemerintahan Reagan. McFarlane dipekerjakan oleh dua orang spekulator komoditi kaya raya dari Chicago, Joseph dan James Ritchie, untuk membantu mereka merekrut dan mengorganisir gerilya anti-Taliban dari para pengungsi Afghan di Pakistan. Kontak mereka dari orang Afghan adalah Abdul Haq, mantan pemimpin Mujahidin yang dieksekusi oleh Taliban segera setelah upayanya membangkitkan pemberontakan di provinsinya.

McFarlane mengadakan rapat dengan Abdul Haq dan pemimpin mujahidin lainnya dalam periode antara musim gugur dan dingin tahun 2000. Setelah pemerintahan Bush berkuasa, McFarlane menggunakan koneksi Republikannya untuk bertemu dengan pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Pentagon dan Gedung Putih, di mana semua amat mendorong persiapan pelaksanaan kampanye militer anti-Taliban.

Pada musim panas, jauh sebelum Amerika Serikat melancarkan serangan udara terhadap Taliban, James Ritchie mengunjungi Tajikistan bersama Abdul Haq dan Peter Tomsen, yang telah lama ditunjuk sebagai utusan khusus AS untuk oposisi Afghan pada pemerintahan Bush yang pertama. Di sana mereka bertemu dengan Ahmed Shah Massoud, pemimpin Aliansi Utara, dengan tujuan melakukan koordinasi dalam serangan yang akan mereka lancarkan dari Pakistan dengan satu-satunya kekuatan militer yang masih melawan Taliban tersebut.

Akhirnya, menurut McFarlane, Abdul Haq “memutuskan untuk melancarkan operasi ke Afghanistan tersebut pada pertengahan Agustus. Ia kembali ke Peshawar, Pakistan, untuk melakukan persiapan terakhir.” Dengan kata lain, tahap persiapan untuk perang anti-Taliban ini telah berjalan jauh sebelum 11 September.

Sementara Joseph dan James Ritchie disorot di media Amerika sebagai “komponen bebas” yang bergerak karena memiliki ikatan emosional dengan Afghanistan, sebuah negara di mana mereka pernah tinggal dalam waktu singkat ketika ayah mereka

bekerja sebagai insinyur sipil di sana pada dekade 1950-an, setidaknya sebuah laporan memperlihatkan adanya kaitan dengan pembicaraan mengenai pipa minyak dengan Taliban. Pada tahun 1998 James Ritchie mengunjungi Afghanistan untuk menemui Taliban dan membahas rencananya untuk mensponsori bisnis-bisnis kecil di negara tersebut. Ia ditemani oleh seorang pejabat dari Delta Oil, Arab Saudi, yang telah berupaya untuk membangun pipa gas melalui Afghanistan dengan bekerjasama dengan sebuah perusahaan minyak Argentina.

Laporan McFarlane tersebut kemudian berlanjut ke sebuah cerita mengenai “pengkhianatan” CIA terhadap Abdul Haq, kegagalan untuk mendukung operasinya di Afghanistan, dan membiarkannya mati di tangan Taliban. CIA sepertinya memandang McFarlane dan Abdul Haq kurang dapat diandalkan – dan organisasi tersebut juga sedang menjalankan perang rahasianya sendiri di wilayah tersebut, di wilayah selatan Afghanistan di mana masyarakatnya sebagian besar berbahasa Pashtun.

Menurut sebuah laporan halaman depan *Washington Post* pada 18 November, CIA telah menggelar operasi paramiliter di Afghanistan selatan sejak tahun 1997. Artikel tersebut ditulis oleh Bob Woodward, penulis harian tersebut yang telah lama menjadi terkenal karena mengungkap skandal Watergate, yang semenjak itu menjadi “penyalur” dari kebocoran informasi militer dan intelijen tingkat tinggi.

Woodward memberikan perincian mengenai peran CIA dalam konflik militer yang tengah terjadi, yang mencakup pengiriman unit paramiliter rahasia, Special Activities Division. Pasukan ini memulai pertempuran pada 27 September, menggunakan unit-unit di darat dan pesawat tanpa awak Predator yang dilengkapi dengan rudal-rudal yang dapat diluncurkan dengan kendali jarak jauh.

Special Activities Division ini, menurut Woodward, “terdiri dari tim yang tidak mengenakan seragam militer. Divisi tersebut memiliki 150 tentara darat, pilot dan spesialis, dan sebagian direkrut dari para veteran yang telah pensiun dari militer AS.

“Semenjak 18 bulan terakhir, CIA telah bekerjasama dengan suku-suku dan pemimpin bersenjata di Afghanistan Selatan, dan unit-unit divisi tersebut telah berhasil menciptakan sebuah jaringan baru yang signifikan di wilayah kekuasaan Taliban.”

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi mata-mata AS telah terlibat dalam penyerangan terhadap rezim Afghanistan – yang dalam kondisi berbeda akan disebut oleh pemerintah AS sebagai terorisme- semenjak musim semi 2000, lebih dari setahun sebelum terjadinya pembajakan bunuh diri yang menghancurkan WTC dan merusak Pentagon.

Dengan menangnya George Bush dalam pemilihan umum, fokus kebijakan Amerika Serikat di Afghanistan berganti dari yang awalnya adalah upaya terbatas untuk membunuh atau menangkap bin Laden menjadi persiapan untuk intervensi militer yang lebih kasar yang diarahkan kepada rezim Taliban secara keseluruhan.

Jane's International Security yang berbasis di Inggris melaporkan pada 15 Maret 2001 bahwa pemerintahan AS sedang bekerjasama dengan India, Iran dan Rusia “dalam sebuah kerjasama untuk melawan rezim Taliban di Afghanistan.” India menyuplai Aliansi Utara dengan peralatan militer, penasihat dan teknisi helikopter, kata laporan tersebut, dan baik India maupun Rusia menggunakan pangkalan-pangkalan di Tajikistan dan Uzbekistan untuk menjalankan operasi tersebut.

Majalah tersebut menambahkan: “Beberapa rapat terakhir terkait dengan kerjasama Indo-AS dan Indo-Rusia terkait terorisme ini mengarah pada suatu upaya bersama untuk melawan Taliban secara taktis dan logistik. Sumber intelijen di Delhi menyebutkan bahwa sementara India, Rusia dan Iran memimpin kampanye anti-Taliban di lapangan, Washington memberikan informasi dan dukungan logistik kepada Aliansi Utara.”

Pada tanggal 23 Mei, Gedung Putih mengumumkan pengangkatan Zalmay Khalilzad untuk memegang posisi di Dewan Keamanan Nasional sebagai asisten khusus untuk presiden dan direktur senior Urusan Teluk, Asia Barat Daya dan Regional Lainnya.

Khalilzad adalah mantan pejabat pada pemerintahan Reagan dan Bush yang pertama. Setelah meninggalkan pemerintahan, ia bekerja untuk Unocal.

Pada tanggal 26 Juni tahun yang sama, majalah *IndiaReacts* melaporkan perincian lebih lanjut mengenai upaya bersama antara AS, India, Rusia dan Iran untuk melawan rezim Taliban. “India dan Iran akan ‘memfasilitasi’ rencana AS dan Rusia untuk sebuah ‘aksi militer terbatas’ untuk melawan Taliban jika sanksi ekonomi yang ditimpakan kepada Taliban tidak berpengaruh terhadap rezim fundamentalis Afghanistan tersebut,” lapor majalah tersebut.

Pada tahapan perencanaan militer ini, AS dan Rusia akan menyuplai bantuan militer langsung kepada Aliansi Utara melalui Uzbekistan dan Tajikistan, guna menekan garis pertahanan Taliban menuju kota Mazar-e-Sharif- sebuah skenario yang terbukti sama persis dengan yang terjadi kemudian. Selain itu, sebuah negara ketiga yang tidak disebut-sebut turut mendukung Aliansi Utara dengan roket anti-tank yang telah digunakan untuk melawan Taliban pada awal Juni.

“Para diplomat mengatakan bahwa gerakan anti-Taliban kembali bergerak menyusul pertemuan antara Sekretaris Negara Colin Powell dan Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov, dan kemudian antara Powell dan Menteri Luar negeri India Jaswant Singh di Washington,” lanjut majalah tersebut. “Rusia, Iran dan India juga mengadakan beberapa diskusi dan diharapkan dapat mengadakan lebih banyak kegiatan diplomatik satu sama lain.”

Berbeda dengan kampanye yang benar-benar dijalankan saat ini, rencana awal melibatkan penggunaan kekuatan militer dari Uzbekistan dan Tajikistan, dan juga Rusia sendiri. *IndiaReacts* juga menyebutkan bahwa pada awal Juni Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan dalam sebuah pertemuan Konfederasi Negara Pecahan Soviet, bahwa aksi militer melawan Taliban akan dibatalkan. Salah satu dampak 1 September adalah menciptakan kondisi bagi AS untuk melakukan intervensi sendiri, tanpa partisipasi langsung oleh kekuatan militer dari negara-negara pecahan Soviet, dan dengan demikian

dapat mengklaim hak mutlak AS untuk mengatur secara penuh pembentukan Afghanistan pasca serangan.

Segera setelah serangan teroris ke WTC dan Pentagon, dua laporan muncul di media Inggris yang mengindikasikan bahwa pemerintah AS telah merencanakan aksi terhadap Afghanistan beberapa bulan sebelum 11 September.

Wartawan BBC George Arney melaporkan pada 18 September bahwa pejabat-pejabat Amerika telah mengatakan kepada mantan Sekretaris Luar Negeri Pakistan, Niaz Naik, pada pertengahan Juli mengenai rencana sebuah aksi militer terhadap rezim Taliban.⁴¹

“Sekretaris Luar Negeri Pakistan Niaz Naik mengatakan bahwa para pejabat AS mengatakan padanya mengenai rencana internasional yang disponsori PBB mengenai Afghanistan yang dilaksanakan di Berlin.” Naik juga mengatakan kepada BBC bahwa pada rapat tersebut perwakilan AS mengatakan padanya bahwa kecuali Bin Laden diserahkan, Amerika akan menggunakan aksi militer untuk membunuh atau menangkap Bin Laden dan pemimpin Taliban, Mullah Omar.⁴²

“Tujuannya yang lebih luas,” menurut Naik, “adalah untuk menggulingkan rezim Taliban dan mencangkokkan sebuah pemerintahan transisi moderat Afghan di negara tersebut – yang kemungkinan dipimpin oleh mantan raja Afghan Zahir Shah.” Selain itu, Naik juga diinformasikan bahwa Washington akan melancarkan operasi tersebut dari pangkalan-pangkalan di Tajikistan, di mana para penasihat AS telah lama ditugaskan di sana. Ia juga diberitahukan bahwa Uzbekistan juga akan turut berpartisipasi dalam operasi tersebut dan bahwa 17.000 pasukan Rusia telah disiagakan. Selanjutnya sumber tersebut juga memberitahukan bahwa jika aksi militer tersebut benar-benar akan dijalankan, maka kemungkinan akan terjadi sebelum salju mulai turun di Afghanistan, paling lambat pada pertengahan Oktober.⁴³

⁴¹http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=afghanwar_tmln&afghanwar_tmln_us_invasion_occupation, diakses pada 14 Maret 2009 pukul 22.00.

⁴² *Ibid*

⁴³ *Log.cit.*

Empat hari kemudian, pada 22 September, harian *Guardian* mengkonfirmasi informasi ini. Peringatan terhadap Afghanistan terlontar dari sebuah pertemuan antara para pejabat senior AS, Rusia, Iran dan Pakistan di sebuah hotel di Berlin pada pertengahan Juli, yang juga merupakan pertemuan ketiga terkait topik “*brainstorming* mengenai Afghanistan.”⁴⁴

Para peserta pertemuan itu, termasuk Naik, tiga orang jenderal Pakistan, mantan Duta Besar Iran untuk PBB Saeed Rajai Khorassani, Abdullah Abdullah, menteri luar negeri Aliansi Utara, Nikolai Kozyrev, mantan utusan khusus Rusia untuk Afghanistan, dan beberapa pejabat Rusia lainnya; serta tiga orang Amerika: Tom Simons, mantan duta besar AS untuk Pakistan, Karl Inderfurth, mantan asisten sekretaris negara untuk urusan Asia Selatan, dan Lee Coldren, yang mengepalai kantor urusan Pakistan, Afghan dan Bangladesh di Departemen Dalam Negeri hingga 1997.⁴⁵

Pertemuan tersebut diketuai oleh Francesc Vendrell, yang semenjak 2002 adalah wakil kepala perwakilan PBB untuk Afghanistan. Sementara tujuan nominal dari konferensi tersebut adalah untuk membahas kemungkinan-kemungkinan pembentukan konstelasi politis di Afghanistan, Taliban menolak untuk mengahdirinya. Perwakilan Amerika membahas perubahan kebijakan terhadap Afghanistan dari Clinton ke Bush, dan amat tegas menyarankan aksi militer sebagai salah satu alternatif.

Sementara ketiga mantan pejabat AS menolak untuk membuat ancaman yang lebih spesifik, kata Coldren kepada the *Guardian*, “terdapat beberapa diskusi mengenai fakta bahwa AS sangat tidak senang terhadap Taliban hingga pada tahap mempertimbangkan aksi militer sebagai alternatif.” Namun Naik mengingat salah seorang perwakilan AS tersebut mengatakan bahwa aksi terhadap bin Laden adalah hampir pasti terjadi:”Kali ini mereka benar-benar serius. Mereka telah mengerahkan seluruh kapasitas intelijen dan tidak akan gagal lagi. Bentuk operasi dapat berupa serangan udara, helikopter, yang bisa jadi akan dilaksanakan begitu dekat dengan atau bahkan di dalam wilayah Afghanistan.”

⁴⁴http://www.historycommons.org/timeline.jsp?timeline=afghanwar_tmln&afghanwar_tmln_us_invasion_occupation, diakses pada 14 Maret 2009 pukul 22.10.

⁴⁵ *Ibid*

The *Guardian* menyimpulkan: “Ancaman perang yang akan dijalankan kecuali Taliban menyerahkan bin Laden disampaikan kepada rezim tersebut oleh pemerintah Pakistan, ungkap salah seorang sumber diplomatik senior. Taliban menolak untuk mematuhi, namun tingkat keseriusan ancaman tersebut meningkatkan kemungkinan bahwa Bin Laden, jauh sebelum serangan terhadap WTC dan Pentagon 10 hari yang lalu, telah melancarkan serangan pencegahan (*pre-emptive strike*) sebagai respon atas apa yang ia pandang sebagai ancaman AS.”⁴⁶

Terlepas dari kebenaran dari berbagai versi kronologis yang pada akhirnya mengantarkan pada keputusan untuk menginvasi Afghanistan, semua argumen-argumen tersebut menurut penulis turut membantu membentuk cara pandang sebagian masyarakat internasional terhadap motivasi AS, setidaknya dalam bentuk mempertanyakan keabsahan alasan resmi, yang diikuti dengan spekulasi alasan yang bagi mereka lebih “masuk akal.”

⁴⁶ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 15 Maret 2009 pukul 11.00.

II.3. Pandangan Berorientasi Murni Ekonomi-Politik

II.3.1. Upaya Memperebutkan Tender Penyaluran Minyak dan Gas Afghanistan

Semenjak awal masa serangan, banyak kalangan yang beranggapan bahwa alasan terorisme yang digunakan Amerika Serikat untuk menginvasi Afghanistan tidak lain hanyalah suatu justifikasi untuk mengamankan kepentingan ekonominya di negara tersebut. Analisis ini menjangkau isu terkait sumber daya alam Afghanistan yang memiliki pengaruh cukup vital bagi Amerika Serikat, yakni minyak dan gas. Salah satu analisis yang ada adalah bahwa tujuan Amerika Serikat untuk menguasai pasokan minyak dan gas melalui saluran pipa yang menuju Turkmenistan hingga Laut Kaspia bahkan telah terlihat lama sebelum penyerangan itu terjadi. Pada tahun 1996-1997, salah satu perusahaan minyak yang berasal dari Amerika Serikat mengalami negosiasi yang sulit untuk mendapatkan tender eksplorasi, eksploitasi dan penyaluran minyak dan gas dari Afghanistan ke beberapa negara lain.⁴⁷

Para elit Amerika Serikat telah memikirkan untuk melaksanakan perang di Asia Tengah setidaknya dalam satu dekade (1990-2000). Pada 1991, mengikuti kekalahan Iraq dalam Perang Teluk Persia, majalah Newsweek menerbitkan artikel berjudul “*Operation Steppe Shield*” Dalam artikel tersebut dilaporkan bahwa militer AS tengah menyiapkan sebuah operasi di Kazakhstan yang mengikuti model Operasi Desert Shield di Arab Saudi, Kuwait dan Irak.

Perusahaan-perusahaan minyak AS menerima hak atas 75 persen dari hasil sumber-sumber minyak baru tersebut, dan para pejabat AS telah mempromosikan Kaspia dan Asia Tengah sebagai alternatif potensial untuk ketergantungan minyak mereka menggantikan wilayah Teluk Persia yang tidak stabil. Pasukan AS menyusul kemudian. Pasukan elitnya (US Special Forces) memulai operasi gabungan di Kazakhstan pada 1997 dan dengan Uzbekistan setahun kemudian, berlatih untuk melakukan intervensi khususnya di wilayah pegunungan di selatan yang mencakup Kyrgyzstan, Tajikistan dan Afghanistan Utara.

⁴⁷ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 15 Maret 2009 pukul 20.30.

Masalah utama dalam mengeksploitasi wilayah Asia Tengah yang kaya minyak adalah bagaimana menghubungkan minyak dan gas dari wilayah tanpa perbatasan laut ke pasar dunia. Para pejabat AS telah menolak ide memanfaatkan sistem pipa Rusia atau jalur darat termudah yang sudah ada, melewati Iran menuju Teluk Persia. Alih-alih, selama dekade 90-an perusahaan-perusahaan minyak dan pejabat AS telah meneliti beberapa alternatif rute jalur pipa – ke barat melalui Azerbaijan, Georgia dan Turki menuju Mediterania, ke timur melalui Kazakhstan dan Cina ke Pasifik, dan yang lebih relevan dengan krisis saat ini, melalui selatan dari Turkmenistan melalui barat Afghanistan dan Pakistan menuju Samudera Hindia.

II.3.2. Lobi Amerika Serikat terhadap Taliban dalam Penyaluran Minyak dan Gas

Rute pipa minyak dan gas Afghanistan didorong oleh perusahaan minyak berbasis di AS, Unocal, yang telah melakukan negosiasi secara intensif dengan rezim Taliban. Namun pembicaraan-pembicaraan tersebut harus berakhir pada tahun 1998 karena memburuknya hubungan AS dengan Afghanistan disebabkan pemboman kedutaan-kedutaan AS di Kenya dan Tanzania, dengan Osama bin Laden dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atasnya. Pada bulan Agustus 1998, pemerintahan Clinton meluncurkan serangan misil jelajah ke suatu tempat yang diduga sebagai kamp pelatihan bin Laden di Afghanistan timur. Pemerintah AS meminta agar Taliban menyerahkan bin Laden dan menjatuhkan sanksi ekonomi. Bersamaan dengan itu berakhir pula pembicaraan mengenai pipa minyak dan gas..⁴⁸

Informasi lain mengenai kontak rahasia antara pemerintahan Bush dan rezim Taliban diungkapkan dalam sebuah buku yang diterbitkan pada 15 November di Prancis berjudul *Bin Laden, the Forbidden Truth*, ditulis oleh Jean-Charles Brisard and Guillaume Dasquie. Brisard adalah mantan agen rahasia Prancis, penulis laporan mengenai jaringan Al Qaeda bin Laden, dan mantan direktur strategi untuk perusahaan Prancis Vivendi, sementara Dasquie adalah seorang wartawan investigasi.

⁴⁸ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 14 Maret 2009 pukul 20.33.

Kedua penulis tersebut menulis bahwa pemerintahan Bush bersedia menerima rezim Taliban, walaupun yang terakhir telah dituduh sebagai sponsor terorisme, jika bersedia bekerjasama membantu rencana pengembangan sumber minyak di Asia Tengah.

Mereka mengklaim bahwa hingga bulan Agustus pemerintah AS memandang Taliban “sebagai sumber stabilitas di kawasan Asia Tengah yang akan memungkinkan pembangunan jalur pipa minyak sepanjang Asia Tengah.” Baru ketika Taliban menolak untuk menerima persyaratan AS “rasionalisasi keamanan energi ini bertransformasi menjadi bersifat militer.”

Jika ditelisik lebih jauh, patut diperhatikan bahwa baik pemerintahan Clinton maupun Bush tidak pernah menempatkan Afghanistan dalam daftar resmi Departemen Dalam Negeri sebagai negara yang mendukung terorisme, terlepas dari keberadaan bin Laden sebagai tamu di dalam rezim Taliban. Konstruksi semacam itu kemudian disadari akan membuat upaya perusahaan minyak atau konstruksi Amerika dengan Kabul untuk membangun pipa minyak dan gas Asia Tengah menjadi tidak mungkin.

II.3.3. Amerika Serikat, Minyak dan Persiapan Invasi Afghanistan

Pembicaraan antara pemerintahan Bush dengan Taliban dimulai pada Februari 2001, segera setelah pengangkatan Bush sebagai presiden. Seorang utusan Taliban tiba di Washington pada bulan Maret dengan berbagai hadiah untuk presiden AS tersebut. Namun pembicaraan yang kemudian terjadi tidak lebih bersahabat. Brisard mengatakan, “pada suatu momen dalam negosiasi tersebut, perwakilan AS mengatakan kepada Taliban, Anda boleh menerima tawaran kami akan karpet emas, atau kami kubur Anda di bawah karpet bom.”

Brisard dan Dasquie menulis bahwa sepanjang masih ada kemungkinan negosiasi mengenai pipa minyak, Gedung Putih terus menunda investigasi apapun terkait aktivitas Osama bin Laden. Mereka melaporkan bahwa John O’Neill, wakil direktur FBI, mengundurkan diri pada bulan Juli sebagai protes atas hal ini. Dalam sebuah wawancara O’Neill menceritakan, “hambatan utama untuk menginvestigasi terorisme Islam adalah kepentingan perusahaan minyak AS dan peran yang dimainkan oleh Arab Saudi di

dalamnya.” Secara kebetulan, O’Neill menerima posisi sebagai kepala keamanan World Trade Center setelah meninggalkan FBI dan turut terbunuh pada 11 September.

Dalam upaya mengkonfirmasi laporan Naiz Naik mengenai pertemuan rahasia di Berlin, kedua penulis Prancis itu menambahkan bahwa terdapat sebuah diskusi terbuka mengenai kebutuhan Taliban untuk memfasilitasi pembangunan pipa minyak dari Kazakhstan guna menjamin pengakuan keberadaannya oleh AS dan masyarakat internasional. Namun pembicaraan-pembicaraan AS-Taliban tersebut akhirnya berakhir pada 2 Agustus, setelah pertemuan akhir antara utusan AS Christina Rocca dan seorang perwakilan Taliban di Islamabad. Dua bulan kemudian AS mulai melakukan pemboman terhadap Kabul..⁴⁹

Informasi-informasi mengenai persiapan perang melawan Afghanistan tersebut kemudian dihentak dengan peristiwa 11 September itu sendiri. Serangan teroris yang menghancurkan WTC dan merusak Pentagon merupakan mata rantai penting dalam rantai sebab-akibat yang akhirnya menyebabkan serangan AS ke Afghanistan. Pemerintah AS sejak awal telah merencanakan perang tersebut, namun tragedi 11 September membuatnya lebih memungkinkan secara politis untuk dilaksanakan, dengan membentuk opini publik di dalam negeri dan memberikan Washington justifikasi lebih terhadap sekutu-sekutunya yang masih enggan di luar negeri.

Baik publik Amerika maupun belasan pemerintahan negara lainnya akhirnya bersatu untuk mendukung aksi militer terhadap Afghanistan, atas nama memerangi terorisme. Administrasi Bush menjadikan Kabul sebagai target tanpa menunjukkan bukti apapun bahwa bin Laden atau rezim Taliban adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi WTC tersebut. Pada akhirnya AS memanfaatkan 11 September sebagai alasan untuk memperkokoh kekuatan AS di Asia Tengah.

Segera setelah 11 September, terdapat laporan pers –sekali lagi sebagian besar berasal dari luar AS- menyatakan bahwa agen intelijen AS sesungguhnya telah menerima peringatan akan adanya serangan teroris berskala besar, termasuk dengan

⁴⁹ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 16 Maret 2009 pukul 23.35.

menggunakan pembajakan pesawat. Ada kemungkinan pengambil kebijakan tingkat tinggi AS dengan sengaja membiarkan hal tersebut tetap terjadi, mungkin tanpa memperhitungkan seberapa besar kerusakan yang akan ditimbulkan, guna mendapatkan alasan yang dibutuhkan untuk perang di Afghanistan.

Sementara itu, menurut sumber Pakistan dan India, Afghanistan baru menandatangani sebuah kontrak besar untuk mendirikan 1680 km pipa minyak dan gas yang diperkirakan bernilai 8 milyar dollar. Jika hal itu berhasil, jalur pipa yang melalui Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India (TAPI) akan mengekspor gas dan kemudian minyak dari Tepi Kaspia ke pesisir Pakistan di mana kapal-kapal tanker kemudian akan membawanya ke Barat.

Tepi Kaspia berada di wilayah Asia Tengah yang mencakup Turkmenistan, Uzbekistan dan Kazakstan, dan disinyalir mengandung 300 trilyun kaki kubik gas dan 100-200 milyar barel minyak. Mengamankan sumber energi besar ini merupakan prioritas strategis bagi negara-negara Barat, yang pada saat bersamaan akan sedikit mengamankan mereka dari pesaing Cina.

Namun hanya ada dua jalan praktis untuk mentransport gas dan minyak dari Asia Tengah ke laut: melalui Iran, atau melalui Afghanistan menuju Pakistan. Bagi Washington, Iran masih merupakan tabu. Dengan demikian pilihannya tinggal Pakistan, dan untuk mencapainya jalur pipa yang disiapkan harus melalui barat Afghanistan, termasuk kota Herat dan Kandahar.

Pada tahun 1998, gerakan anti-komunis Afghanistan, Taliban, dan sebuah konsorsium perusahaan minyak barat yang dipimpin oleh perusahaan AS Unocal menandatangani sebuah kesepakatan pembangunan jalur pipa besar. UNOCAL mengucurkan dana dan perhatian pada Taliban, mengundang delegasi senior mereka ke Texas, serta mempekerjakan seorang pejabat Afghan bernama Hamid Karzai.

Di sisi lain, Osama bin Laden menyarankan para pemimpin Taliban untuk menolak kesepakatan tersebut dan mempersuasinya untuk menerima tawaran yang lebih

baik dari konsorsium minyak Argentina, Brida. Washington kecewa akan hal ini dan menurut beberapa informasi mengancam untuk memerangi Taliban.

Pada awal 2001, enam atau tujuh bulan sebelum 11 September, Washington membuat keputusan untuk menginvasi Afghanistan, menggulingkan Taliban, dan mencangkokkan ke negara tersebut rezim “klien” yang akan membangun jalur pipa yang direncanakan. Namun demikian, Washington terus mengucurkan dana kepada Taliban hingga empat bulan sebelum 11 September untuk menjaganya tetap di pihak yang sama jika sewaktu-waktu sampai terjadi perang dengan Iran.

Serangan 11 September, di mana Taliban tidak mengetahui apapun mengenainya, memberikan alasan untuk menginvasi Afghanistan. Justifikasi awal AS adalah untuk menghancurkan Osama bin Laden dan al-Qaida. Namun setelah 300 pasukan diberangkatkan ke Pakistan, AS tetap bertahan, membangun pangkalan, yang secara kebetulan berada di dekat jalur pipa yang direncanakan, dan menempatkan “konsultan” UNOCAL Hamid Karzai sebagai pemimpin.

Washington menyembunyikan geopolitik energinya dengan mengklaim bahwa pendudukan Afghanistan bertujuan untuk memerangi “terorisme Islam”, membebaskan wanita, membangun sekolah-sekolah dan mempromosikan demokrasi. Ironisnya, klaim tersebut persis dengan yang digunakan Soviet ketika menduduki Afghanistan dari 1979-1989.⁵⁰

Rencana pembangunan pipa minyak TAPI tersebut akan segera dijalankan begitu Taliban dibersihkan dari area yang bersangkutan oleh pasukan AS, Kanada dan NATO. Seorang analis AS, Kevin Phillips menulis bahwa kekuatan militer AS dan sekutunya telah berubah menjadi “kekuatan pengamanan energi”.

⁵⁰ <http://www.wsws.org/articles/2001/nov2001/afgh-n20.shtml>, diakses pada 18 Maret pukul 23.50.

II.3.4. Amerika Serikat dan Keamanan Energi

Arti minyak yang begitu penting bagi AS ini diungkapkan dalam komentar salah seorang penulis artikel berikut: “Dalam dunia modern tempat kita tinggal, energi lebih berharga daripada darah. AS adalah kekuatan besar dengan kebutuhan energi yang masif. Dominasi atas minyak adalah pilar kekuatan global AS. Afghanistan dan Irak, karenanya, hanyalah bagian dari permainan besar untuk mengontrol minyak tersebut.”⁵¹

Sohan Sarma, seorang Profesor di California State University dan Surinder Kumar, seorang professor ekonomi di Rohtak, menyatakan bahwa, “Guna memecah OPEC dan mengendalikan suplai minyak dunia, menguasai negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah dan Asia Tengah yang dilalui jalur pipa akan amat berarti signifikan. Serangan dan pendudukan pertama dilakukan terhadap Afghanistan pada Oktober 2001, pertama karena Negara yang bersangkutan memang penghasil migas, namun juga karena merupakan Negara di mana minyak dan gas Asia Tengah dan Laut Kaspia akan dikapalkan/disalurkan melalui pipa ke Pakistan dan India yang amat membutuhkannya. Afghanistan juga menyediakan alternative untuk menggantikan jalur pipa Rusia yang telah ada sebelumnya. Bersamaan dengan hal itu, AS menerima pangkalan militer sebanyak 19 buah di Negara-negara Asia Tengah seperti Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyztan dan Turkmenistan di Tepi Kaspia, yang semuanya merupakan produsen minyak.”⁵²

II.3.5. Project for the New American Century

The Project for a New American Century adalah sebuah kelompok *think tank* politik yang didanai oleh filantropis konservatif pada tahun 1997, dan oleh beberapa kalangan dianggap sebagai salah satu faktor penjustifikasi upaya AS untuk mendapatkan hegemoni dan dominasi dunia. Sebagaimana dinyatakan oleh William Kristol, kepala PNAC,

⁵¹ <http://www.lewrockwell.com/margolis/margolis114.html>, diakses pada 18 April pukul 00.14.

⁵² http://www.thirdworldtraveler.com/Iraq/Iraq_dollar_vs_euro.html, diakses pada 18 April pukul 18.00.

“bangsa kita harus berupaya untuk mencapai hegemoni global yang kokoh.” Kelompok inilah yang bertanggung jawab mempromosikan konsep baru dan mengejutkan yang disebut dengan “*pre-emptive war*” sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut.⁵³

PNAC yang berada di Washington, D.C. ini hanya bertahan hingga 2006. Didirikan oleh William Kristol dan Robert Kagan, organisasi ini mengambil bentuk nirlaba dan edukatif. Tujuan resmi PNAC adalah “untuk mempromosikan kepemimpinan global Amerika Serikat.” Pandangan fundamental dari organisasi ini adalah “Kepemimpinan Amerika Serikat adalah baik untuk Amerika sendiri maupun untuk dunia”, dan mendukung “kebijakan ala Reagan yang bertumpu pada militer dan kejelasan moral.” Para kritikus menyatakan bahwa organisasi ini memiliki pengaruh besar terhadap para petinggi AS dalam masa administrasi Presiden George W. Bush, serta mempengaruhinya lebih lanjut secara spesifik dalam bidang militer dan kebijakan luar negeri, khususnya terkait dengan keamanan nasional dan Perang Afghanistan dan Irak.⁵⁴

Beberapa agenda utama yang dipromosikan oleh PNAC adalah:⁵⁵

- Meningkatkan anggaran pertahanan secara signifikan guna membantu menjalankan tanggung jawab global AS dan memodernisasi angkatan perang AS di masa mendatang.
- Meningkatkan ikatan dengan para sekutu demokratis dan melawan rezim-rezim yang menentang kepentingan dan nilai AS.

Mendorong penerimaan tanggung jawab dan peran Amerika Serikat yang unik dalam mempertahankan dan memperluas tatanan internasional yang bersahabat bagi keamanan, kesejahteraan dan prinsip-prinsip Amerika Serikat.

Salah satu bukti *concern* PNAC terhadap isu Afghanistan adalah pernyataan Kristol dan Kagan dalam Weekly Standard edisi 29 Oktober 2001, bahwa:⁵⁶

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ <http://www.newamericancentury.org/statementofprinciples.htm>, diakses pada 12 Mei 2009 pukul 17.04.

⁵⁵ *Log.cit.*

⁵⁶ <http://pnac.info/index.php/2005/afghanistan-the-war-without-end/>, diakses pada 11 Mei 2009 pukul 16.33.

“Kami tidak mengharapkan berkurangnya tantangan dan bahaya yang mengancam pasukan kita dalam misi yang tengah dijalankannya di Afghanistan, khususnya mengingat baru-baru ini administrasi Bush secara bijak telah mengerahkan pasukan darat AS secara lebih agresif. Kami mensyukuri fakta bahwa Presiden Bush mengikuti saran Pentagon untuk melakukan percepatan dalam kampanye militer untuk menggulingkan Taliban, tanpa menunggu Departemen Dalam Negeri menentukan para pejabat kabinet dan sub-kabinet imajiner yang akan ditempatkan dalam pemerintahan pasca-Taliban. Kami juga tidak meragukan arti penting kemenangan mutlak di Afghanistan- sebuah kemenangan yang ditandai dengan kehancuran total Taliban, al Qaeda dan Osama bin Laden.

“Namun perang ini tidak akan berakhir di Afghanistan. Sebaliknya, perang ini akan terus menyebar dan menerpa sejumlah negara dalam bentuk konflik dengan beragam intensitasnya. Hal ini juga akan memerlukan penggunaan kekuatan militer AS di berbagai tempat secara bersamaan. Jika ia benar-benar terjadi, maka tidak dapat dipungkiri bahwa gambaran yang akan muncul adalah Benturan Peradaban, sebagaimana yang ingin dihindari semua orang. Hal ini pada gilirannya juga akan menciptakan beban luar biasa besar pada koalisi internasional yang kini telah terbentuk secara konsensus.”

II.3.6. Beberapa Permasalahan Terkait Pandangan Ekonomi Politik

Penjelasan ekonomi-politik belum berhasil menjelaskan mengapa secara de facto Amerika Serikat memandang Islam dalam kebijakan luar negerinya sebagai ancaman keamanan, sebagaimana dinyatakan oleh Steve Niva, “Bagaimanapun, kebijakan AS saat ini terhadap kaum Islamis bersifat ambigu, yang dicirikan dengan paduan antara konfrontasi dan interaksi damai. Di satu sisi, AS masih memandang dan memperlakukan pemerintahan dan aktivis Islam sebagai ancaman keamanan. Para pembuat kebijakan telah menempatkan *counter-terrorism* sebagai agenda puncak pada level domestik dan internasional, hingga mendapatkan dukungan untuk mengajukan rancangan-rancangan undang-undang “anti-terorisme” yang lebih ekstrim, yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan melawan “teror kaum Islamis.”⁵⁷ Amerika memiliki kepentingan besar untuk

⁵⁷ Steve Niva, *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam*, dalam *Middle East Report*, No.208, *Middle East research and Information Project*, 1998, hlm. 4.

mempromosikan nilai-nilai demokrasi dan liberalnya dan mengubah apa yang dianggapnya sebagai bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Hal ini sesungguhnya telah berlangsung sejak lama, bahkan sebelum masa administrasi George W. Bush. Pada masa Clinton misalnya, menerapkan apa yang disebutnya sebagai “doktrin *rogue state*”, yang memasukkan konsep pembendungan (*containment*) dan isolasi terhadap beberapa negara Islam seperti Iran dan Sudan, sementara pada saat yang bersamaan terus mendukung Mesir dan Tunisia dalam penindasan brutal mereka terhadap pergerakan Islam atas nama memberantas “terorisme.” Namun pemerintahan Clinton tidak terlalu memberi perhatian pada pemerintahan dari partai Islam di Turki yang terpilih secara demokratis.⁵⁸

II.4. Pandangan Berorientasi Murni Identitas/Kultural

II.4.1. Respon “Dunia Islam” terhadap Serangan AS atas Afghanistan: Liberalisme Barat VS Islam

Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka yang paling meyakini “skenario besar” (Barat vs Islam) tersebut justru adalah sebagian dari masyarakat Islam sendiri. Hal ini dapat dipahami mengingat mereka memandang dirinya sebagai korban yang diperlakukan secara tidak adil, sementara pada saat yang bersamaan mereka merasa berkewajiban untuk menegakkan supremasi identitas tersebut dalam skala yang sama dengan yang diinginkan oleh negara seperti Amerika Serikat yang menginginkan hegemoninya terus terjaga di muka bumi, khususnya terkait dengan kejayaan masa lalu peradaban ini yang kerap kali memunculkan *sense of grandiosity* (perasaan bangga terhadap kebesaran masa lalu dan keinginan kuat untuk membangkitkannya kembali). Karenanya adalah wajar jika beberapa pendukung teori kultur memandang bahwa “konfrontasi” antara Barat dengan Islam memang merupakan konfrontasi yang tidak akan pernah habis sebelum salah satu kalah terhadap pihak yang lain, disebabkan secara fundamental keduanya memang tidak dapat dipertemukan.

Al-Attas misalnya mencatat bahwa konfrontasi antara kultur dan peradaban Barat dengan Islam, pada level sejarah keagamaan maupun level militer, sekarang bergerak pada level intelektual; dan kita harus realistis bahwa konfrontasi ini secara alamiah merupakan hal yang permanen secara historis. Islam dilihat oleh Barat sebagai penentang

⁵⁸*Ibid.*

pandangan hidupnya yang paling dasar; penentangan yang bukan hanya terhadap agama Kristen barat, tetapi juga terhadap Aristotelianisme dan prinsip-prinsip epistemologis dan filosofis yang diturunkan dari pemikiran Yunani-Romawi, yang membentuk komponen dominan yang memadukan elemen-elemen kunci dalam *Western worldview*.⁵⁹

Hal ini juga setidaknya memperlihatkan bahwa agama memang masih memainkan peranan dalam skala tertentu pada suatu komunitas, sebagaimana dinyatakan oleh Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah Inggris, “banyak peradaban yang hancur karena “bunuh diri” dan bukan karena benturan dengan kekuatan luar. Agama dan spiritualitas memainkan peran sebagai *chrysalis* (kepompong) yang merupakan cikal bakal umbuhnya satu peradaban. Antara kematian dan kebangkitan suatu peradaban baru, selalu terdapat suatu kelompok yang disebut *creative minorities*, yang dengan semangat spiritual mendalam atau motivasi agama bekerja keras untuk melahirkan satu peradaban baru dari reruntuhan peradaban lama. Karena itu, aspek spiritual memainkan peran sentral dalam mempertahankan eksistensi suatu peradaban. Peradaban yang telah hilang inti spiritualitasnya akan mengalami penurunan.”⁶⁰

Para pendukung pandangan ini semakin mendapatkan justifikasi ketika melihat apa yang dilakukan AS pasca serangan, di mana instrumen-instrumennya melakukan intervensi dalam kehidupan masyarakat kebanyakan, yang dalam pandangan kaum Islamis adalah bertentangan dengan nilai-nilai dan gaya hidup mereka. Beberapa contohnya adalah penerapan demokrasi di Afghanistan, pembukaan sekolah-sekolah bagi perempuan, menghapuskan kewajiban mengenakan pakaian burdah dan menetap di rumah bagi perempuan sebagaimana pada saat rezim Taliban, juga berbagai hal lainnya.⁶¹ Walaupun demikian, pendudukan Amerika Serikat atas Afghanistan memang bukan hanya sebatas hal-hal di atas, melainkan juga meliputi berbagai tindakan kekerasan baik kepada tahanan yang diduga sebagai teroris meskipun tanpa bukti, serta kepada masyarakat awam. Rekonstruksi Afghanistan yang dijanjikan AS memang tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang dapat dilihat dari kesaksian para pekerja sosial di negara tersebut, di mana dana jutaan dolar yang konon disalurkan untuk membangun

⁵⁹ Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam and Secularism*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993), hlm.105.

⁶⁰ Patricia M. Mische. *Toward a Civilization Worthy of the Human Person*, pendahuluan dalam buku *Toward Global Civilization? The Contribution of Religions*, (New York: Peter Lang publishing, Inc., 2001), hlm.6.

⁶¹ *Op.Cit.*, hlm.111.

infrastruktur pada kenyataannya tidak mewujudkan menjadi suatu produk yang nyata dan bermanfaat.⁶²

II.4.2. Huntington dan Benturan Peradaban

Pada kutub yang berbeda, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan, terdapat mereka yang meyakini bahwa perang Afghanistan sebenarnya hanyalah sebuah bagian kecil dari skenario besar yang penuh kekerasan yang dijalankan oleh Amerika Serikat (sebagai representasi Barat) terhadap Islam. Terjadi perluasan makna dari terorisme menjadi Islam radikal, dan, dalam beberapa kasus, menjadi Islam secara umum.

Tak pelak lagi dari sekian banyak ilmuwan politik yang mengutarakan argumen sejenis, sosok yang paling sering dijadikan referensi adalah Samuel P. Huntington, seorang profesor politik dari Harvard, yang selama beberapa periode merupakan penasihat kebijakan luar negeri Gedung Putih. Dalam buku monumentalnya yang berjudul *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, Huntington memberikan prediksi skala makro mengenai konstelasi politik internasional pasca perang dingin, dinamika yang akan terjadi didalamnya (khususnya merujuk pada bentuk aliansi dan konfrontasi), serta aktor-aktor yang akan menjadi pemeran penting dalam konstelasi tersebut. Argumen Huntington pada intinya adalah: Budaya dan identitas budaya, yang pada skalanya yang paling luas adalah identitas peradaban, membentuk pola kohesi disintegrasi dan konflik pada periode pasca-Perang Dingin. (hlm. 20). Setelah revolusi Iran 1979, menurutnya, sebuah perang semu (*quasi-war*) antar peradaban, dalam hal ini antara Islam dengan Barat mulai terbuka (hlm.216 dan 185) dan pada dekade 1980-an, konflik antar peradaban digantikan dengan cepat oleh konflik ideologi antara komunis dan kapitalis. Namun di masa yang akan datang, konflik internasional yang paling panjang dan berdarah akan terjadi antara negara-negara dengan peradaban yang berbeda (*cleavage/fault lines*) (hlm.253). Baru-baru ini, ia juga menyatakan bahwa “keterkaitan antara power dan budaya akan amat menentukan pola aliansi dan antagonisme antara negara-negara di tahun-tahun mendatang” (Huntington, 1999:46).

⁶² Salah satu contohnya adalah “pembangunan” atau “perbaikan” sekolah perempuan yang di atas kertas menelan dana puluhan ribu dolar ternyata hanya menghasilkan sekolah perempuan yang beratapkan seng (yang rubuh kembali dalam waktu singkat), fasilitas yang jauh dari cukup, serta bangunan yang mudah runtuh. Disinyalir terjadi penyelewengan dalam penyaluran dana rekonstruksi.
<http://www.lewrockwell.com/margolis/margolis114.html>, diakses pada 17 Mei 2009 pukul 12.25.

Sebagaimana sempat disinggung, terlepas dari kebenaran tesis ini, pada tatanan riil sebagian pihak cenderung memiliki kepercayaan yang kuat terhadap kebenaran tesis Benturan Peradaban, yang khususnya berasal dari umat Islam. Hal ini terbukti dari seringnya banyak pihak yang memiliki otoritas terkait isu ini, baik kalangan akademik maupun religi dan politik, merujuk frase Benturan Peradaban, yang seringkali dikembangkan sebagai “Perang melawan Islam”, menjadi suatu komponen penting dalam sudut pandang dan *world-view* mereka. Signifikansi tesis ini antara lain diungkapkan oleh Steve Niva dalam artikelnya yang berjudul *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam*, di mana ia mengatakan bahwa, “Kebijakan AS terhadap Islamisme adalah sebuah barometer benturan antara dua paradigma: visi konservatif Perang Dingin ala Huntington dan kemenangan neo-liberal dengan jargon “Akhir Sejarah” Fukuyama.”⁶³

Sebagaimana pandangan pertama yang menekankan bahwa motif Amerika dalam penyerangan Afghanistan tidak sedangkai pernyataan resmi pemerintah AS sendiri, demikian pula pandangan yang melihat identitas sebagai faktor utama. Pada umumnya para pendukung pandangan ini melihat bahwa serangan Amerika Serikat tersebut merupakan kampanye besar-besaran untuk menghancurkan entitas dengan identitas yang dianggap merupakan ancaman nyata, yaitu Islam. Alasan identitas ini, menurut mereka yang mempercayainya, telah berusia jauh lebih lama dari konflik itu sendiri.

Beberapa suara yang paling keras menentang skenario “ancaman Islam” berasal dari spesialis dan ahli Timur Tengah di Universitas Georgetown, Profesor John Esposito dan mantan analis CIA Graham Fuller, antara lain, yang menentang pemahaman “neo-Orientalis” yang menggambarkan Islam yang monolitik, anti-demokrasi dan secara inheren selalu anti-Barat. Mereka menyorot perbedaan penting di kalangan pergerakan Islam yang dilabel dengan nama “fundamentalis,” menekankan bahwa sebagian besar kelompok yang menggunakan kekerasan sesungguhnya merepresentasikan suatu bentuk ekstrim (*fringe*). Para ahli ini berpendapat bahwa Islamisme tercipta akibat kegagalan rezim sekuler untuk menciptakan keadilan ekonomi dan demokrasi, yang semakin diperkuat oleh keinginan masyarakat luas untuk bebas dari dominasi Barat. Lebih lanjut, mereka juga berpendapat bahwa kebijakan AS turut bertanggung jawab terhadap

⁶³ *Ibid*

munculnya gerakan-gerakan semacam itu karena dukungan yang diberikannya terhadap diktator-diktator represif dunia dan juga dukungannya terhadap Israel. Oleh karena itu, sebuah perang yang dilancarkan terhadap Islam untuk mendukung “keamanan nasional” dapat semakin mempolarisasi masyarakat Muslim terhadap Barat serta memperdalam kebencian terhadap Barat di dunia Islam.⁶⁴

Steve Niva mengatakan bahwa pengaruh realis tradisional seperti *contiguity* (kedekatan), aliansi dan *relative power*, serta pengaruh liberal dalam konsep demokrasi gabungan (*joint democracy*) dan interdependensi, memberikan penjelasan yang jauh lebih baik dalam menganalisis konflik interstate. Dua negara yang berasal dari peradaban yang berbeda tidak mengalami kecenderungan untuk terlibat dalam konflik dibandingkan dengan negara dengan kriteria berbeda. Bahkan konflik yang terjadi antara Barat dan seluruh dunia, atau dengan Islam, tidak lebih sering daripada yang terjadi antara atau di dalam kelompok lainnya. Selain itu di antara delapan peradaban menurut Huntington, konflik interstate tidak hanya jamak terjadi dalam peradaban Barat saja, namun juga dalam peradaban-peradaban lainnya dalam skala yang sama dengan yang mungkin terjadi lintas peradaban. Identitas dominan peradaban dari sebuah negara inti, demokrasi atau tidak, hanya sedikit berpengaruh menciptakan kekerasan dalam peradaban yang sama.⁶⁵

Ia menyimpulkan bahwa perspektif ‘benturan peradaban’ telah salah dalam menilai masa lalu, menginterpretasikan kejadian-kejadian masa kini secara selektif, dan tidak menawarkan panduan yang meyakinkan untuk memprediksi masa depan. Perbedaan peradaban hanya menambah sedikit saja penjelasan realis dan liberal mengenai konflik interstate.⁶⁶

Tesis Huntington bahwa perbedaan budaya dapat mengakibatkan konflik memiliki akar mendalam di ranah psikologi sosial. Intinya adalah pembedaan antara orang dalam (*in-group*) dan orang luar (*outsider*), di mana perasaan kesatuan sebagai *in-group* dapat dicapai dengan memelihara konflik dengan pihak luar yang berbeda.⁶⁷ Huntington menyatakan bahwa identitas pada level apapun – baik personal, kesukuan, ras hingga

⁶⁴ Steve Niva. *Between Clash and Co-optation: US Foreign Policy and the Specter of Islam*. Middle East Report, No.208, Middle East research and Information Project:1998, hlm 6.

⁶⁵ Michaelene Cox, et.al. *Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence*. *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No.5 (Sep.,2000), pp.583-608. Sage Publications, Ltd., hlm.1.

⁶⁶ *Op.cit*, hlm.4.

⁶⁷ *Ibid*.

peradaban- hanya dapat didefinisikan dalam kaitannya dengan “pihak lain” (hlm. 129).⁶⁸ Pandangan ini sebenarnya banyak memiliki persamaan dengan beberapa analisis lain yang menekankan bahwa perbedaan identitas adalah sebuah “masalah pemicu”. Versi sosiologi dari pandangan ini sering dihubungkan dengan Simmel (1898); hal itu kemudian diinterpretasikan dan diperluas oleh Coser (1956). Pandangan tersebut telah diterima secara luas – dengan hasil yang beragam – dalam teori dan penelitian hubungan internasional. Fokus dari karya-karya tersebut adalah menjelaskan kondisi-kondisi di mana kohesi dapat ditingkatkan atau dicerai berai dengan konfrontasi dengan “yang lain.” Salah satu versi menyatakan bahwa manusia pada hakikatnya memang amat mudah terpicu konflik sosial yang didasarkan oleh perbedaan *in-group/outgroup*. Shaw dan Wang (1988:207), misalnya, mengatakan bahwa: Kecenderungan manusia untuk berperang sesungguhnya adalah hasil dari ribuan tahun evolusi di dalam mana kognisi dan intoleransi dari para anggota out-group telah dibentuk oleh prioritas gen-kultur koevolusi.⁶⁹

Huntington memandang adanya ancaman spesifik bagi Barat yang berasal dari negara-negara Islam. Dalam pandangannya, perbedaan fundamental antara kedua budaya ini berkaitan dengan sumber legitimasi pemerintah – apakah berasal dari kehendak rakyat atau kitab suci dan otoritas religius – benar-benar tidak dapat dipersatukan. Namun demikian, jika suatu masyarakat Islam ternyata mampu menjadi lebih demokratis, maka pertentangan antara Barat dan Islam akan menjadi lebih “jinak.”⁷⁰

Karenanya, adalah penting untuk menentukan apakah peradaban adalah akar penyebab konflik interstate, atau apakah penyebab konflik terutama adalah institusi, norma dan praktik politik dan ekonomi yang dapat berubah. Adalah relevan pula untuk mempertimbangkan apakah perbedaan peradaban juga memiliki signifikansi dalam variasi fenomena-fenomena tersebut.⁷¹

Huntington meyakini bahwa sesungguhnya identitas **peradaban bersifat lebih menentukan daripada nasionalisme** dalam menciptakan sumber konflik (yang dapat

⁶⁸ Michaelene Cox, et.al. Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence, *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No.5 (Sep.,2000), pp.583-608, Sage Publications, Ltd, hlm.1.

⁶⁹ *Ibid*, hlm.4.

⁷⁰ *Op.cit*, hlm.5.

⁷¹ *Ibid*.

diragukan dalam kasus peradaban Islam, di mana kepentingan nasional terkait negara tertentu berulang-ulang telah berjaya di atas sentimen Islamis atau pun pan-Arabisme)⁷²

Setelah menekankan signifikansi identitas sebagai faktor penentu, maka faktor ini juga dapat dikerucutkan menjadi identitas agama, yang ia anggap sebagai inti identitas yang paling rawan akan menciptakan benturan. Huntington meyakini bahwa eksklusivitas agama jauh lebih mengada dibandingkan dengan yang diciptakan oleh ras atau etnis, dengan ilustrasi “seseorang mungkin dapat menjadi separuh Prancis dan separuh Arab dan secara bersamaan bahkan menjadi warga negara kedua negara tersebut, namun adalah lebih sulit membayangkan untuk menjadi separuh Katolik dan separuh Muslim.” (hlm.27).⁷³

Huntington melihat pertentangan antara Kristen-Barat dengan Islam memang merupakan fenomena yang amat, jika tidak dikatakan paling, mungkin terjadi, mengingat dinamika historis panjang di antara keduanya. Misalnya, Huntington misalnya menekankan bahwa peradaban Kristen dan Islam telah terlibat dalam perang selama berabad-abad dan mengutip data Richardson (1960) mengenai “*deadly quarrels*”, di mana si penulis menyatakan bahwa “50 persen perang yang melibatkan negara-negara dengan latar belakang religius yang berbeda antara 1820-1929 adalah peperangan antara Muslim dan Kristen” (Huntington 1996:210). Ia juga meyakini bahwa penyebab panjangnya peperangan antara peradaban Islam dan Kristen “bukan terletak pada fenomena transisi seperti semangat Kristiani abad 12 atau pun fundamentalisme Muslim abad 20, namun lebih kepada dasar kedua agama tersebut serta peradaban yang tercipta dari kedua dasar tersebut (hlm.210). Dengan demikian, ia meramalkan bahwa “sepanjang Islam tetap menjadi Islam dan Barat tetap menjadi Barat, konflik fundamental antara kedua peradaban besar sekaligus jalan hidup tersebut akan terus mendefinisikan hubungannya di masa depan sebagaimana kedua ajaran tersebut mendefinisikan hubungan keduanya semenjak 14 abad silam (Hlm.212).⁷⁴

Menurut Huntington, benturan peradaban pada masa pasca-Perang Dingin merupakan akibat dari: (1) meningkatnya interaksi antar masyarakat dari peradaban yang berbeda,

⁷² *Op.cit.*, hlm.7.

⁷³ Errol A. Henderson. *Mistaken Identity: Testing the Clash of Civilizations Thesis in Light of Democratic Peace Claims*, (Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2002), hlm. 6.

⁷⁴ *Ibid*, hlm.12.

(2) de-Westernisasi elit di negara-negara non-Barat, (3) meningkatnya regionalisasi ekonomi, (4) bangkitnya kembali identitas religius dalam skala global, (5) pergantian demografi dan ekonomi dalam perimbangan kekuatan (*balance of power*) terhadap negara-negara non-Barat, khususnya negara-negara Asia dan Islam, dengan cara-cara yang menantang hegemoni Barat. Interaksi dari berbagai faktor tersebut mengakibatkan meningkatnya signifikansi keanggotaan peradaban dalam politik global.⁷⁵

Banyak dari konflik yang ia identifikasi akan terjadi di garis batas (*fault lines*) peradaban adalah yang terjadi antara negara-negara tetangga, di mana konflik diperkirakan akan terjadi baik terkait dengan perbedaan peradaban atau kultural atau tidak. Gurr (1994) menerapkan analisis sistematis untuk menilai validitas perspektif Huntington untuk menjelaskan kekerasan yang terjadi antar-state. Hasilnya menunjukkan bahwa masyarakat yang berasal dari peradaban yang berbeda tidak umum atau cenderung untuk menjadi sebagaimana dalam prediksi Huntington. Dari 50 konflik etnopolitis skala serius yang terjadi antara 1993-1994, hanya 18 yang sesuai dengan pembagian menurut Huntington.⁷⁶

Serupa dengan ide-ide besar lainnya, ia juga memiliki potensi untuk tidak hanya menjadi alat interpretasi analitis atas sebuah fenomena, namun – jika dipercaya secara luas – juga berpotensi menjadi pembentuk fenomena itu sendiri (*the shaper of event*). Jika karakterisasi itu kemudian dipahami secara salah, maka mereka yang mempercayainya pun berarti telah tersesat. Setelah satu abad yang penuh dengan konsekuensi kebencian etnis dan ras, dan kini menjelang era senjata pemusnah massal, “Tidak ada yang lebih berbahaya bagi bangsa-bangsa Timur dan Barat daripada jika mereka saling mempersiapkan diri untuk menghadapi satu sama lain, dengan berlandaskan pada keyakinan akan adanya konfrontasi antara Kristen dan Islam (Herzog, 1999:12, Holmes, 1997 and Walt, 1997). Hasil terburuk yang dapat diperkirakan dari hal ini adalah terjadinya ‘benturan’ yang disebabkan oleh *self-fulfilling prophecy*, meningkatkan atau menciptakan konflik yang seharusnya tidak terjadi (setidaknya tanpa alasan-alasan tersebut). Di sisi berlawanan, kemungkinan terbaik yang dapat diharapkan dari tesis tersebut adalah sebuah *self-defeating prophecy*, di mana tesis tersebut digunakan sebagai

⁷⁵ *Ibid.* Hlm. 5

⁷⁶ Michaelene Cox, et.al, Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence, dalam *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No.5 (Sep.,2000), pp.583-608. Sage Publications, Ltd, hlm.8.

peringatan dini bagi para pembuat kebijakan yang akan mengambil langkah untuk mencegah bahaya yang telah diprediksi dalam tesis tersebut.⁷⁷

II.4.3. Pengaruh Media Amerika Serikat terhadap Pencitraan Islam

Media-media massa besar AS turut mengarahkan opini dunia dengan berulang-ulang menyampaikan sikap negara-negara yang mendukung AS. Berita seputar aksi anti-AS di banyak negara tidak disiarkan. Di sisi lain, media AS semakin menguatkan kesan bahwa Islam dalam wujud yang militan, fundamentalis, radikal, atau ekstrem adalah kelompok anti AS yang berarti musuh peradaban dunia; sebuah rekayasa propaganda yang sama sekali tidak obyektif.⁷⁸

Hal ini diungkapkan antara lain oleh Mehdi Hassan, seorang jurnalis Inggris untuk the Guardian. Ia mengungkapkan bahwa Penelitian jurnalistik yang dilakukan oleh Departemen Jurnalistik Cardiff University mengenai isi dan konteks dari hampir seribu artikel yang ditulis mengenai Islam dan Muslim semenjak tahun 2000 memperlihatkan bahwa lebih dari dua pertiga kisah yang terkait dengan Muslim menempatkan Muslim dan Islam sebagai sumber masalah atau bahkan ancaman, tidak hanya dalam konteks terorisme, namun juga dalam isu kultural. Bahkan pada tahun 2008 tulisan-tulisan yang membahas mengenai masalah yang timbul karena perbedaan budaya ini menjadi lebih dominan ketimbang yang dikaitkan dengan isu terorisme. Selama beberapa tahun terakhir hingga saat ini, satu dari empat cerita/berita yang dimasukkan ke media mengandung ide bahwa Islam berbahaya, terbelakang atau irasional.⁷⁹

Untuk kesekian kalinya, stereotip negatif tentang Islam di Barat ini dipandang oleh sebagian kaum Muslim sebagai jejak-jejak kebencian kultural-historis selama 1400 tahun, menyebutkan pola interaksi kurang harmonis antara Islam-Kristen selama Perang Salib, ancaman Ottoman selama abad 14-19.⁸⁰ Sikap dan perasaan seperti ini telah lama dimiliki

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Mohammad Shoelhi, *Demi Harga Diri Mereka Melawan Amerika*, (Jakarta: Pustaka Zaman, 2003), hlm.151.

⁷⁹ <http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2008/jul/07/channel4.islam>, diakses pada 18 Mei 2009 pukul 21.30.

⁸⁰ <http://www.islamfortoday.com/media.htm>, diakses pada 24 Mei 2009 pukul 20.00.

oleh Barat semenjak kehadiran Islam, dan hal yang sama tengah terjadi pada Barat saat ini, menurut Hassan Anser.⁸¹

Sementara itu Olfat Hasan Agha menyatakan bahwa saat ini Barat, baik dengan atau tanpa pemahaman mengenai sejarah Islam, telah mengidentifikasinya sebagai musuh baru, "suatu iblis baru yang telah menggantikan ancaman Merah pada Perang Dingin, yakni kaum Islam radikal. "Islam radikal" ini kemudian menjadi stereotip yang umum terjadi dalam pemikiran Barat, yang memperlihatkan umat Muslim sebagai fundamentalis atau potensi teroris. Salah satu penyebab dari tersebarnya pemikiran semacam ini di kalangan masyarakat Barat adalah akibat pengaruh media massa Barat. Para reporter yang meliput mengenai hal-hal terkait dengan Islam atau dunia Islam seringkali hanya mengetahui sedikit pengetahuan tentang objek garapan mereka. Selanjutnya media mengembangkan citra Islam yang telah terdistorsi yang secara mentah-mentah ditelan oleh peradaban dan kebudayaan Barat.⁸²

Mohammed A. Siddiqi, seorang professor di Western Illinois University, mengatakan bahwa peliputan terhadap Islam secara keseluruhan didominasi oleh New York Times, Los Angeles Times, USA Today dan Newsweek. Siddiqi menyatakan bahwa kesalahan paling mengkhawatirkan terkait peliputan terhadap Islam disebabkan karena: 1) penggunaan istilah/pelabelan "fundamentalis" terhadap setiap Muslim tanpa kecuali, dan 2) kegagalan untuk membedakan antara praktik cultural yang berasal dari budaya nasional atau regional yang tidak dilakukan oleh Muslim lain di negara-negara maupun region yang berbeda.⁸³

II.4.4. Permasalahan dalam Pandangan Berorientasi Murni Identitas/Kultural

Bagaimanapun, bukti yang ada menunjukkan bahwa konflik peradaban tidak meningkat setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada kenyataannya, yang terjadi adalah

⁸¹ Hassan, Anser. Invitation to Islam: Islamic Stereotypes in Western Mass Media, dari <http://psirus.sfsu.edu/IntRel/IRJournal/sp95/hassan.html>, diakses pada 22 Mei 2009 pukul 21.20.

⁸² Agha, Dr. Olfat Hassan. Islamic Fundamentalism and Its Image in the Western Media, dari <http://bertie.la.utexas.edu/research/mena/acpss/english/ekuras/ek25.html#heading5>, diakses pada 22 Mei 2009 pukul 21.30.

⁸³ <http://www.jannah.org/articles/media.html>, diakses pada 23 Mei 2009 pukul 20.00.

yang sebaliknya: konflik antar peradaban justru menjadi lebih jarang. Perang Dingin tidak menekan konflik regional, namun justru menekannya. Oleh karenanya, perbedaan peradaban hanya menjelaskan amat sedikit dari pola ekonomi maupun sistem politik.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Sambanis dan Regan (2000) mengenai frekuensi konflik bersenjata *inter-state* memperlihatkan bahwa konflik etnis dan religius telah meningkat sebesar 59% (17/29) dari konflik bersenjata *inter-state* selama tahun-tahun akhir Perang Dingin menjadi 67% (20/30) dari seluruh konflik pascaperang Dingin (patut diingat bahwa konflik bersenjata *inter-state* terjadi paling umum pada periode ini). Serupa dengan hal itu, data lain mengungkapkan pula bahwa konflik etnis/religius sebagai sebuah proporsi dari seluruh konflik bersenjata meningkat dari level Perang Dingin pada tingkat 55% (21/38) berubah pada masa pascaperang Dingin hingga 77% (33/43). Hasil dari penelitian tersebut juga membantah tesis Huntington, namun jika kita memeriksa lebih lanjut frekuensi dari konflik bersenjata yang akan dikategorikan sebagai “benturan peradaban” menurut Huntington, maka akan dihasilkan deskripsi yang sama sekali berbeda. Misalnya, meskipun frekuensi dari konflik etnis bersenjata meningkat sejak akhir Perang Dingin, proporsi dari konflik etnis yang dapat dianggap sebagai benturan peradaban telah berkurang dari 53% (9/17) menjadi 45% (9/20) menurut data Sambani. Penemuan dengan menggunakan data Regan (2000) bahkan menunjukkan bahwa benturan peradaban sebagai proporsi dari konflik etnis bersenjata telah berkurang dari 53% (11/21) menjadi 36% (12/33) sejak berakhirnya Perang Dingin.

Akhirnya, ketika kita mempertimbangkan proporsi “benturan peradaban” pada seluruh konflik *inter-state*, kita menemukan bahwa proporsi benturan peradaban telah berkurang semenjak akhir Perang Dingin, sebagaimana dinyatakan oleh Gurr (1994), dengan data Sambani, yang memperlihatkan penurunan dari 31% menjadi 30% dan data yang memperlihatkan pengurangan dari 29% menjadi 28% dalam kedua era tersebut. Meskipun penurunan ini mungkin tidak terasa drastis, namun satu hal yang jelas adalah kita tidak sedang menyaksikan era baru “benturan peradaban” dengan berakhirnya Perang

⁸⁴ Michaelene Cox, et.al. Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence. *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No.5 (Sep.,2000), pp.583-608. Sage Publications, Ltd, hlm.20.

Dingin, dan data terbaru menunjukkan hal terbaik.⁸⁵ Henderson dan Tuckers (2001) menemukan bahwa faktor-faktor idealis seperti demokrasi gabungan (*joint democracy*) dan faktor realis seperti power relatif terbukti jauh lebih penting diperhitungkan dalam konflik internasional sepanjang ketiga periode waktu yang bersangkutan⁸⁶.

Guna menjawab Russett et all (2000), Huntington (2000:609) menyatakan bahwa waktu yang diperlukan untuk membuktikan tesisnya masih belum mencukupi, mengingat tesisnya bertujuan untuk memprediksi dunia pasca-Perang Dingin secara eksplisit. Russett dan Oneal (2000:611) menjawab bahwa meskipun Huntington berfokus pada era pasca-Perang Dingin dalam tesisnya, “ia menggunakan sejarah untuk menjustifikasi tesisnya tersebut.” Mereka melanjutkan: “misalnya berkaitan dengan rasionalisasinya atas konflik yang ia prediksi akan terjadi antara Barat dan Islam. Konflik yang terjadi antara *fault line* antara peradaban Barat dan Islam telah berlangsung selama lebih dari 1300 tahun.” Huntington memasukkan Perang Salib, bangkit dan jatuhnya kekaisaran Ottoman, dan imperialisme Eropa untuk mendukung pendapatnya tersebut. Permasalahannya bukanlah menggunakan sejarah untuk memberi petunjuk untuk memprediksi masa depan, namun apakah bukti-bukti yang ada diteliti secara sistematis atau anekdot.”⁸⁷ Data yang telah dibahas di atas memperlihatkan bahwa ketika kita meneliti data terbaru dari era pasca-Perang Dingin, tesis Huntington tidak hanya tidak terbukti, namun bukti yang ada justru menunjukkan hasil yang berlawanan dengan tesisnya. Dengan demikian, “benturan peradaban” telah menghilang dari era pasca-Perang Dingin.⁸⁸

Peradaban tidak menciptakan *fault lines* di mana konflik internasional akan terjadi. Hal yang lebih relevan adalah ikatan bersama dari demokrasi dan interdependensi ekonomi yang mempersatukan atau memisahkan banyak negara. Pengaruh realis adalah penting bagi negara-negara yang tidak menjalankan atau memiliki ikatan liberal. Bagi negara-negara seperti ini, realpolitik masih menentukan segala hal terkait konflik.⁸⁹

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbatasan peradaban memainkan peranan substantif dalam membentuk pola aliansi, meskipun sebagian besar variasi

⁸⁵ Errol A. Henderson. *Mistaken Identity: Testing the Clash of Civilizations Thesis in Light of Democratic Peace Claims* (Pennsylvania: Pennsylvania State University, 2002), hlm. 8.

⁸⁶ *Op.cit.*, hlm.10.

⁸⁷ *Op.cit.*, hlm.10.

⁸⁸ *Op.cit.*, hlm. 10-11.

⁸⁹ Michaelene Cox, et.al. Clash of Civilizations, or Realism and Liberalism Déjà vu? Some Evidence. *Journal of Peace Research*, Vol. 37, No.5 (Sep.,2000), pp.583-608. Sage Publications, Ltd, hlm.21.

kesepakatan keamanan formal juga memiliki pengaruhnya sendiri. Namun hal tersebut tidak terlihat mempengaruhi perdagangan maupun derajat demokrasi untuk mendukung klaim bahwa perbedaan peradaban dan persamaan antara pengaruh tidak langsung utama dalam faktor-faktor yang memicu konfrontasi militer. Peradaban tidak menciptakan peradaban, sebaliknya, adalah pengaruh liberal dan realis yang menciptakannya.⁹⁰ Perasaan identitas bersama di antara masyarakat yang bersifat demokratis membentuk perasaan in-group dengan masyarakat lain yang serupa, dan menciptakan perasaan berbeda terhadap mereka yang memiliki pemerintahan berbeda. Serupa dengan hal itu, perdagangan internasional dan institusi pasar bebas dapat pula berdampak sama. Hal itu adalah potensi bahaya dari resep liberal mengenai formasi yang diperlukan untuk mencapai perdamaian (sesama negara demokrasi dan liberal tidak akan saling menyerang). Namun jika faktor kultural yang begitu kuat seperti identitas peradaban ternyata terbukti hanya berdampak kecil terhadap konflik interstate, adalah mungkin bahwa perasaan identitas yang timbul dari suatu persamaan sistem politik tidak akan menjadi ancaman pula, dan tidak pula resep Kant untuk ‘perdamaian abadi/*perpetual peace*’ dapat dijustifikasi dengan nilai-nilai liberal seperti toleransi dan resolusi konflik tanpa kekerasan semata.⁹¹

Akhirnya, Huntington menyerukan adanya suatu keterbukaan, pembelajaran bersama, bahkan inovasi budaya –orientasi normatif yang terlihat amat kontras dengan penilaian kulturalnya atas perkembangan trend di dunia kita: benturan peradaban. Kesimpulan ini, menurut Dieter Senghaas, “merupakan akhir yang janggal dari karyanya tersebut.”⁹²

Dalam hal ini ditemukan bahwa bertentangan dengan asumsi awal mengenai tesis benturan peradaban Huntington, perbedaan peradaban tidak berhubungan secara signifikan dengan meningkatnya kemungkinan atas perang *inter-state*, khususnya ketika terkait dengan proksimitas, tipe rezim, dan kapabilitas relatif dari kedua negara. Bahkan penemuan kita mengindikasikan bahwa di mana suatu keanggotaan peradaban dikaitkan

⁹⁰ *Ibid* hlm.20

⁹¹ *Ibid.* hlm.22

⁹² Dieter Senghaas. A Clash of Civilizations : An Idee Fixe? *Journal of Peace Research*, Vol.35, No.1 (Jan., 1998), Sage Publications, Ltd, hlm.7.

dengan kemungkinan perang, maka hubungan antar kedua variabel tersebut sama sekali bertolak belakang dengan yang dinyatakan dalam tesis Benturan Peradaban Huntington.⁹³



⁹³ Errol A. Henderson and Richard Tucker, Clear and Present Stranger: The Clash of Civilizations and International Conflict, *International Studies Quarterly*, Vol.45, No.2 (Jun.,2001), Blackwell Publishing., hlm.19.